

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PADANG TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN PADANG

Jl. Raya Padang No. 48 Telp. 0334 - 893264 Fax. 0334 - 893264

email : kecamatanpadang@gmail.com

PADANG - 67352

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, Rencana Strategis Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 telah dapat diselesaikan. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Disadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, diharap semua kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Padang, Mei 2023

CAMAT PADANG


DRS. JAMAK NURWANTO

NIP. 19690606 199803 1 006

DAFTAR ISI	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	45
2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan	45
2.6. Kerjasama Perangkat Daerah	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	47
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
3.2. Isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran	52
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	72

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	93
7.1	Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026	93
7.2	Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	94
BAB VIII	PENUTUP	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Padang Tahun 2024 - 2026 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Padang) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Padang, maka disusunlah Renstra Kecamatan Padang sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Padang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 tahun kedepan 2024 - 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026, dokumen Renstra Kecamatan Padang ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Padang untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Padang yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Padang, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Padang.

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Padang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama tiga tahun maupun Rencana Kerja PD (Renja PD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-PD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan PD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-PD, yang diikuti dengan pemantauan,

evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodeklasifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodeklasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2023-2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Instruksi Presiden No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan;
25. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2012 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 28. Permendagri no 67 tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
36. Perbup Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026;
37. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra
 - a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai.
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
 - d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Padang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan Penyusunan Renstra
 - a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kantor Kecamatan Padang selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 3 (tiga) tahun ke depan.
 - f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

- g. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
- h. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Kecamatan Padang dalam rentang tahun 2024-2026;
- i. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Padang dalam rentang tahun 2024-2026

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Padang diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.7. Kerjasama Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

	3.2. Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. Tujuan dan Sasaran
	4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSA
	7.1 Penentuan Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026
	7.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
BAB VI	PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Padang menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019, yang merupakan perubahan Peraturan Bupati tentang SOTK dari yang semula nomor 86 Tahun 2016, yang terdiri dari :

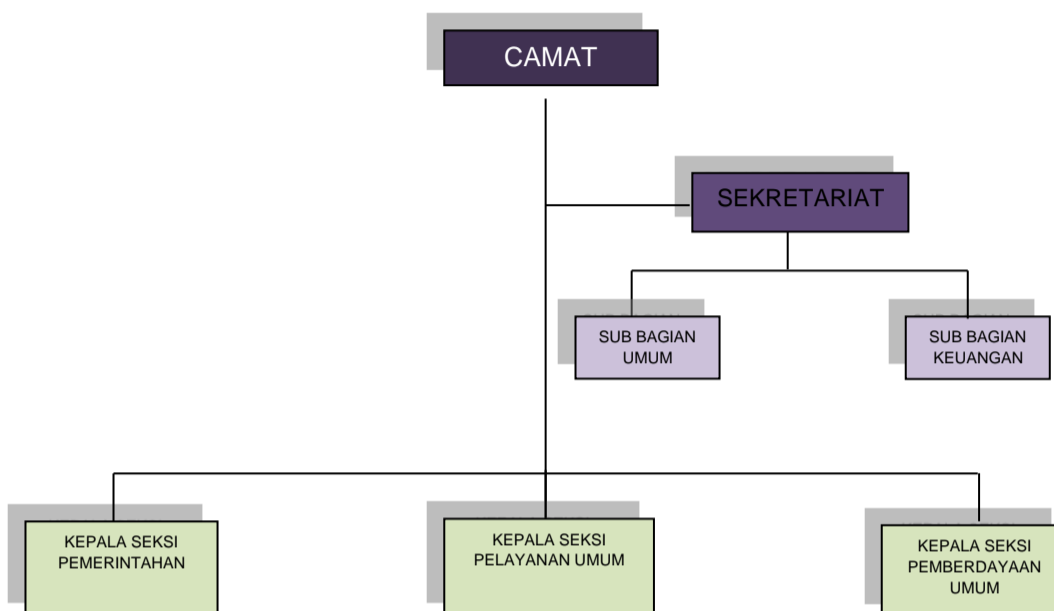
1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Perubahan terjadi pada penghapusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Perekonomian Pembangunan. Sedangkan tugas pokok Seksi yang terhapus, melebur kedalam salah satu Seksi yang ada. Antara lain, tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemerintahan, dan Seksi Perekonomian Pembangunan menjadi satu dalam tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan gambaran tentang baganSusunan Organisasi Kantor Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

**Bagan Organisasi Kecamatan Padang
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok.

2.1.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan

8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat Kecamatan
2. Pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
4. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan
5. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
7. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan.
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan

5. Melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kecamatan
6. Melakukan administrasi kepegawaian
7. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit.
9. Melakukan administrasi barang milik daerah
10. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan
11. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan
12. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan
15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan

2.1.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan
3. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis, Rencana Kerja / Renja, laporan akuntabilitas kinerja Instansi / LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat)
5. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
6. Penyiapan pertanggungjawaban keuangan
7. Melakukan penyusunan laporan keuangan
8. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program Sub Bagian Keuangan
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.1.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan
3. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideology Negara dan kesatuan bangsa
4. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
6. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undang
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
9. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di Kecamatan
10. Melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang- undangan lainnya diwilayah kerjanya
11. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintan ditingkat Kecamatan
12. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa
13. Melaksanakan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa
14. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan asset desa
15. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
16. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
17. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

18. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
19. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
20. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa
21. Pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan
22. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
23. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
24. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2.6 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pelayanan Umum
3. Mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
7. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta
8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Camat

2.1.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan
2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat
3. Mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan
4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan
5. Melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa / kelurahan di wilayah kecamatan
6. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan
7. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
8. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan
9. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas tugas, fungsi dan kewajiban dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan
10. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
11. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
12. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
13. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
14. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Gambaran Umum

Kecamatan Padang adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian barat Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Senduro. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan sumber Kabupate Probolinggo Sebelah Utara, Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

Untuk mencapai Kecamatan Padang dapat ditempuh melalui empat pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Sumber Kabupaten Probilinggo (sebelah barat), Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Senduro (dari sebelah Selatan), Kecamatan Kedungjajang (dari sebelah Utara).

Secara geografis Kecamatan Padang merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Kondisi Geografis Kecamatan Padang

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	59,17 Km ²
2	Ketinggian	100-500 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	36.536
	Laki laki	17.789
	Perempuan	18.747
4	Jumlah Kepala Keluarga	22.118
5	Kepadatan Penduduk	692 jiwa/ Km ²
6	Jumlah desa	9
7	Jumlah dusun	41
8	Jumlah RT/RW	312/72
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	1.289
10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Sukodono Kecamatan Sumbersuko Kecamatan Padang

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2022

TABEL 2.2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang

No.	Desa	Jumla		
		Dusun	RW	RT
1	BARAT	6	13	59
2	BABAKAN	3	4	26
3	MOJO	4	9	36
4	BODANG	9	11	55
5	KEDAWUNG	5	8	36
6	PADANG	3	6	19
7	KALISEMUT	3	6	28
8	MERAKAN	4	6	29
9	TANGGUNG	4	9	24
JUMLAH		41	72	312

Sumber: Validasi data Kec. Padang, 2022

Tabel 2.2.3
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1	BARAT	3 Km	21 Km	149 Km
2	BABAKAN	1 Km	21 Km	152 Km
3	MOJO	3 Km	19 Km	149 Km
4	BODANG	4 Km	18 Km	148 Km
5	KEDAWUNG	5 Km	17 Km	147 Km
6	PADANG	10 Km	12 Km	142 Km
7	KALISEMUT	1 Km	21 Km	152 Km
8	MERAKAN	3 Km	19 Km	149 Km
9	TANGGUNG	4 Km	18 Km	148 Km

Tabel 2.2.4**Penduduk Kecamatan Padang Menurut Desa**

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	BARAT	10	6.581	5.781	13.362	2.142
2	BABAKAN	12,01	6.850	6.853	13.703	3.388
3	MOJO	20,92	3.934	4.005	7.939	2.225
4	BODANG	20,92	3.934	4.005	7.939	2.225
5	KEDAWUNG	13,38	3.533	3.502	7.035	2.025
6	PADANG	13,94	2.976	2.947	5.923	1.882
7	KALISEMUT	13,38	3.533	3.502	7.035	2.025
8	MERAKAN	13,94	2.976	2.947	5.923	1.882
9	TANGGUNG	16,81	2.657	2.735	5.392	1.586
Kecamatan	2023	87,06	26.531	26.823	53.354	13.848
	2017	87,06			49.608	13.685
	2016	87,06			47.280	13.248

Tabel 2.2.5**Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok**

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1	BARAT	26	11,35	37
2	BABAKAN	18	33	51
3	MOJO	48	25	73
4	BODANG	37	25	62
5	KEDAWUNG	18	33	51
6	PADANG	14	9,8	23,8
7	KALISEMUT	9	17	26
8	MERAKAN	14	9,8	23,8
9	TANGGUNG	37	25	62
Kecamatan		152	121,15	273,15

Tabel .2.2.6**Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan Pendidikan**

No	Desa	SD	SMP	SMA
1.	BARAT	3	1	-
2.	BABAKAN	2	-	-
3.	MOJO	1	1	-
4.	BODANG	4	1	-
5.	KEDAWUNG	4	1	-
6.	PADANG	5	-	-
7.	KALISEMUT	2	-	-
8.	MERAKAN	3	1	-
9.	TANGGUNG	1	1	-

Tabel 2.2.7**Banyaknya Pemeluk Agama Tiap Desa**

No	Desa	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu	Budha
1.	BARAT	3.603	-	-	-	-
2.	BABAKAN	1.233	-	-	549	-
3.	MOJO	1.171	-	-	207	-
4.	BODANG	5.001	38	-	-	-
5.	KEDAWUNG	4.815	-	-	-	-
6.	PADANG	4.951	-	-	-	-
7.	KALISEMUT	1.907	1	-	-	-
8.	MERAKAN	2.394	-	-	-	-
9.	TANGGUNG	1.067	-	-	-	-

Tabel 2.2.8**Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa**

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1	BARAT	6	1	-	-
2	BABAKAN	3	1	-	-
3	MOJO	4	1	-	-
4	BODANG	9	1	-	-
5	KEDAWUNG	5	1	-	-
6	PADANG	3	1	-	-
7	KALISEMUT	3	1	-	-
8	MERAKAN	4	1	-	-
9	TANGGUNG	4	1	-	-
Jumlah		41	9	-	-

Tabel 2.2.9

Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1	BARAT	1	6
2	BABAKAN	1	3
3	MOJO	1	4
4	BODANG	1	9
5	KEDAWUNG	1	5
6	PADANG	1	3
7	KALISEMUT	1	3
8	MERAKAN	1	4
9	TANGGUNG	1	4
Jumlah		9	41

Tabel 2.2.10

Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	BARAT	-	-	-	-	-	-
2	BABAKAN	-	-	-	-	-	-
3	MOJO	-	-	-	-	-	-
4	BODANG	-	-	-	-	-	-
5	KEDAWUNG	-	-	-	-	-	-
6	PADANG	-	-	-	-	-	-
7	KALISEMUT	-	-	-	-	-	-
8	MERAKAN	-	-	-	-	-	-
9	TANGGUNG	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2.11

Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	BARAT	-	-	-	-	-	-
2	BABAKAN	-	-	-	-	-	-
3	MOJO	-	-	-	-	-	-
4	BODANG	-	-	-	-	-	-
5	KEDAWUNG	-	-	-	-	-	-
6	PADANG	-	-	-	-	-	-
7	KALISEMUT	-	-	-	-	-	-
8	MERAKAN	-	-	-	-	-	-
9	TANGGUNG	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2.12
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		-	-	-	-
1	BARAT	-	-	-	-
2	BABAKAN	-	-	-	-
3	MOJO	-	-	-	-
4	BODANG	-	-	-	-
5	KEDAWUNG	-	-	-	-
6	PADANG	-	-	-	-
7	KALISEMUT	-	-	-	-
8	MERAKAN	-	-	-	-
9	TANGGUNG	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	-

2.2 .2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Padang telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang
Tahun 2023

No.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Drs. JAMAK NURWANTO	L	Camat
2.	Dra. MAWI MUJAYANTI	L	Sekretaris Kecamatan
3.	BAMBANG BAGYO IS	L	Kasi. Pemerintahan
4.	ALI WAFA	L	Kasi. Pemberdayaan Masy.
5.	MIJEN	L	Kasi. Pelayanan Umum
6.	KHOLIFAH,S.Sos	L	Kasubbag. Keuangan
7.	RIZAL PAHLEFIE, SH	L	Kasubbag. Umum
8.	SAODAH	L	Staf Fungsional Umum
9.	SOKHIBIL KAROMAH	L	Staf Fungsional Umum
10.	MUHAMMAD YAZID	P	Staf Fungsional Umum

11.	ZAINUDIN GHOZALI	L	Staf Fungsional Umum
12.	ABDUL SOMAD	L	Staf Fungsional Umum
13.	SUJUD	L	Tenaga Kontrak
14.	SAIFUDIN	L	Tenaga Kontrak
15.	SUGIARTI	P	Tenaga Kontrak
16.	INTAN DWI SEPTIAN, SE	P	Tenaga Kontrak
17.	CHUCHU CHRISMAYNENGRUM ISMAYNENGRUM	P	Tenaga Kontrak

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Padang, data diolah 2023.

- 2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang
 Dari 12 (Dua Belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Padang dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut:

TABEL 2.2.14
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	2 orang
2	Penata Tk I (III/d)	3 orang
3	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
4	Penata Muda (III/a)	1 orang
5	Pengatur Tk I (II/c)	4 orang
6	Pengatur Muda TK I (II/b)	1 orang
7	Juru Muda (I/b)	- orang
8	Tenaga Kontrak	5 orang
Jumlah		17 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Padang, data diolah 2023.

TABEL 2.2.15
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Padang
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2023

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	1 Orang
2	DIKLAT PIM IV	2 Orang
Jumlah		3 Orang

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Padang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.16
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Padang Berdasarkan
Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2023

No.	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	61.600.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan	671.866.050,-
3	Aset Bangunan Gedung	2.071.636.000,-
Jumlah		2.805.102.050,-

Sumber : SIMBADA Kec. Padang, data diolah 2023

TABEL 2.2.17
ASET INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN
KECAMATAN PADANG TAHUN 2023

No	Kode Barang	Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6
1	0202030402	GENSET / Generating Set	2012	1	3.000.000,00
2	0203010103	Mobil	2007	1	159.250.000,00
3	0203010501	Sepeda Motor	1992	1	4.750.000,00
4	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.273.000,00
5	0203010501	Sepeda Motor	2006	1	9.667.000,00
6	0203010501	Sepeda Motor	2008	1	12.586.000,00
7	0206020650	TRIPOD	2016	1	830.000,00
8	0206010102	Mesin Ketik	2003	1	1.500.000,00
9	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
10	0206010401	LEMARI BESI SLIDING KACA	2015	1	2.600.000,00
11	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
12	0206010401	LEMARI BESI 2 PINTU	2015	1	2.300.000,00
13	0206010401	LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU	2016	1	3.500.000,00
14	0206010402	RAK BESI	2015	1	1.080.000,00
15	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
16	0206010404	Filing Kabinet	1997	1	1.250.000,00
17	0206010404	Filing Kabinet	2014	1	4.500.000,00
18	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00
19	0206010404	FILLING CABINET	2015	1	3.700.000,00

20	0206010404	Filing Kabinet	2013	1	4.500.000,00
21	0206010406	Brand Kas	1997	1	3.550.000,00
22	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
23	0206010412	Lemari Kaca	2014	1	3.000.000,00
24	0206010412	LEMARI KACA	2015	1	3.000.000,00
25	0206010412	LEMARI TEMPAT KORAN	2015	1	700.000,00
26	0206010412	KOTAK SARAN	2016	1	865.000,00
27	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2013	1	10.000.000,00
28	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
29	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
30	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
31	0206010501	Papan Data Monografi	2009	1	1.750.000,00
32	0206010506	Papan Struktur Organisasi	1997	1	500.000,00
33	0206010526	Punc Card	1998	1	4.150.000,00
34	0206010539	NEON BOX	2015	1	6.000.000,00
35	0206010539	LED DISPLAY	2016	1	5.000.000,00
36	0206010540	Mesin Laminating	1998	1	2.300.000,00
37	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00
38	0206020101	Lemari Kayu	2014	1	2.750.000,00
39	0206020101	LEMARI ARSIP + BACKDROP	2015	1	10.000.000,00
40	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
41	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
42	0206020101	Almari / Lemari	1998	1	500.000,00
43	0206020105	KURSI BESI	2015	1	2.500.000,00
44	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
45	0206020105	KURSI BESI	2016	1	2.500.000,00
46	0206020107	Kursi Tamu / Zice	1990	1	1.000.000,00
47	0206020107	MEJA KURSI TAMU	2015	1	5.000.000,00
48	0206020110	Meja Rapat	2013	1	2.000.000,00
49	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
50	0206020110	MEJA RAPAT	2016	1	5.000.000,00
51	0206020115	Meja Podium	2013	1	2.000.000,00
52	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
53	0206020117	Meja Pelayanan	2013	1	2.000.000,00
54	0206020128	KURSI TAMU CAMAT	2016	1	7.500.000,00
55	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
56	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
57	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
58	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00

59	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
60	0206020131	Kursi Staf	2014	1	1.000.000,00
61	0206020133	Kursi Tunggu	2014	1	2.500.000,00
62	0206020137	Meja Komputer	2008	1	600.000,00
63	0206020137	MEJA KOMPUTER	2015	1	1.600.000,00
64	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
65	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
66	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
67	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
68	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
69	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
70	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
71	0206020148	MEJA KAYU	2015	1	1.000.000,00
72	0206020161	GORDEN	2015	1	16.838.800,00
73	0206020301	VACUM CLEANER	2015	1	2.000.000,00
74	0206020303	Mesin Peotong Rumput	2012	1	1.500.000,00
75	0206020403	AC / Air Conditioner	2013	1	4.000.000,00
76	0206020403	AC / Air Conditioner	2014	1	4.000.000,00
77	0206020403	AC	2015	1	4.000.000,00
78	0206020403	AC	2016	1	5.000.000,00
79	0206020403	AC / Air Conditioner	2012	1	4.000.000,00
80	0206020406	Kipas Angin	1999	1	500.000,00
81	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00
82	0206020406	Kipas Angin	2014	1	600.000,00
83	0206020603	Televisi	2014	1	4.500.000,00
84	0206020603	TV LED 32	2015	1	4.500.000,00
85	0206020603	TELEVISI	2016	1	1.800.000,00
86	0206020608	SOUNDSYSTE M	2015	1	6.800.000,00
87	0206020612	Wirelles Audio Visual (All in One)	2012	1	7.815.000,00
88	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
89	0206020618	UPS	1999	1	1.350.000,00
90	0206020618	UPS	2010	1	550.000,00
91	0206020619	STAVOLT	2013	1	4.000.000,00
92	0206020623	KAMERA FOTO	2015	1	3.500.000,00
93	0206020649	HANDYCAM	2015	1	5.000.000,00
94	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
95	0206030201	KOMPUTER PC	2016	1	8.500.000,00
96	0206030201	Komputer	1999	1	7.000.000,00
97	0206030201	Komputer	1999	1	7.550.000,00
98	0206030201	Komputer PC : Core i7	2013	1	10.000.000,00
99	0206030201	KOMPUTER PC	2015	1	7.000.000,00
100	0206030201	Komputer / PC	2011	1	7.600.000,00
101	0206030201	Komputer / PC	2011	1	6.230.000,00
102	0206030201	KOMPUTER PC EFINANCE	2015	1	10.000.000,00
103	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00

104	0206030201	Komputer-PC	2014	1	7.000.000,00
105	0206030202	Laptop	2011	1	8.745.000,00
106	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
107	0206030202	LAPTOP	2015	1	7.000.000,00
108	0206030202	LAPTOP	2016	1	7.500.000,00
109	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
110	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
111	0206020618	UPS	2016	1	1.000.000,00
112	0206030503	Printer	2002	1	5.875.000,00
113	0206030503	PRINTER LQ	2015	1	2.530.000,00
114	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
115	0206030503	PRINTER	2015	1	700.000,00
116	0206030503	Printer : HP	2013	1	2.400.000,00
117	0206030503	PRINTER LASER JET FC	2016	1	1.750.000,00
118	0206030503	PRINTER FOTOCOPI	2015	1	4.260.000,00
119	0206030503	PRINTER	2015	1	1.300.000,00
120	0206030504	Scanner	2002	1	1.000.000,00
121	0206030504	Scanner	2002	1	1.350.000,00
122	0206030604	Modem	2006	1	1.300.000,00
123	0206040105	Meja Eselon III	1980	1	3.465.000,00
124	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
125	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
126	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
127	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
128	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
129	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
130	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
131	0206040106	Meja Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.288.000,00
132	0206040305	Kursi Eselon III	1980	1	1.486.000,00
133	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
134	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
135	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
136	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
137	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
138	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
139	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
140	0206040306	Kursi Kerja Pejabat ES-IV	2012	1	1.370.000,00
141	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00
142	0206020403	AC	2017	1	6.150.000,00

143	0206020403	AC	2017	1	4.200.000,00
144	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
145	0206020133	Kursi Tunggu Busa	2017	1	3.700.000,00
146	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
147	0206020110	Meja Rapat	2017	1	5.000.000,00
148	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
149	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
150	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
151	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
152	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
153	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
154	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
155	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
156	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
157	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
158	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
159	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
160	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
161	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
162	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
163	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
164	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
165	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
166	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
167	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
168	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
169	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
170	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
171	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
172	0206020134	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
173	0206020135	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
174	0206020136	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
175	0206020137	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
176	0206020138	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
177	0206020139	Kursi Rapat	2017	1	548.000,00
178	0206020401	Lemari Es	2017	1	1.500.000,00
179	0206020608	Sound Sistem siaran keliling	2017	1	4.500.000,00
180	0206020612	Wireless Sound Sistem	2017	1	13.300.000,00
181	0206020639	Dispenser	2017	1	1.023.000,00
182	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
183	0206020301	Alat Pemadam Kebakaran	2017	1	1.660.000,00
184	0206030202	Laptop	2017	1	10.801.000,00
185	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
186	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
187	0206030503	Printer	2017	1	2.586.000,00
188	0206020108	Tempat Tidur	2017	1	9.000.000,00
189	0206020101	Almari	2017	1	6.034.000,00
190	0206020304	Mesin Cuci	2017	1	3.128.000,00
191	0206020401	Lemari Es	2017	1	2.765.000,00
192	0206020502	Kompas Gas	2017	1	543.000,00

193	0206020161	Rak Piring	2017	1	2.000.000,00
194	0206020161	Tangga Almunium	2017	1	1.135.000,00
195	0206020146	Karpet	2017	10	6.000.000,00
196	0206030503	Printer	2017	1	4.090.000,00
197	0207020102	Radio Ratel	1982	1	1.583.000,00
198	0207020120	Faximile	1982	1	1.600.000,00
		Jumlah 2017		207	740.729.800,00
		Tambahan 2023			
199	0203010501	Sepeda Motor	2023	1	17.925.000,00
200	0203010501	Sepeda Motor	2023	1	17.925.000,00
201	0203010501	Sepeda Motor	2023	1	17.925.000,00
202	0203010501	Sepeda Motor	2023	1	26.375.000,00
203	0206010528	LCD-Proyektor / OHP	2023	1	5.995.000,00
204	0206020131	Kursi Staf	2023	6	7.062.000,00
205	0206020108	Tempat Tidur SpringBed	2023	2	16.940.000,00
206	0206020112	Kursi dan Meja Makan	2023	1	8.195.000,00
207	0206020101	Lemari Pakaian	2023	1	6.545.000,00
208	0206020107	Kursi dan Meja Tamu	2023	1	7.480.000,00
209	0206020406	Kipas Angin	2023	2	1.375.000,00
210	0206020613	Megaphone	2023	1	1.705.000,00
211	0206020161	Tempat sampah 3 in 1	2023	1	902.000,00
212	0206020618	UPS	2023	2	8.910.000,00
213	0206030503	Printer	2023	3	4.455.000,00
		JUMLAH		232	890.443.800,00

TABEL 2.2.18
ASET INVENTARIS BANGUNAN GEDUNG
KECAMATAN PADANG TAHUN 2023

Nama Barang / Aset Tetap	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
Bangunan Gedung Puskesmas	1999	322.582.520
Bangunan Gedung Kantor : Induk	1999	453.128.051
Bangunan Gedung Kantor : Belakang	1999	114.342.030
Bangunan Pendopo	1999	189.551.000
Bangunan Gedung Pertemuan	1999	38.889.420
JUMLAH AT Peralatan dan Mesin		1.118.493.021

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 3 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Padang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif.

Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2024-2026 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Padang, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Padang tahun 2024.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Padang menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;

- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kecamatan Padang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain:

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Padang

Sebagai bentuk kinerja pelayanan PD Kecamatan Padang tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam

kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2022, yaitu :

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Padang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

Pencapaian target Renstra Kecamatan Padang tahun 2014 – 2018 diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padang
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2019 - 2020																			
1	Nilai IKM Kecamatan	N/A	N/A	-	83.55	84	N/A	N/A	N/A	83.55	84	N/A	N/A	N/A	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	-	92%	92.67%	N/A	N/A	N/A	92%	92.67%	N/A	N/A	N/A	1.00	1.00	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran	N/A	N/A	-	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	N/A	N/A		65	75	N/A	N/A	N/A	65	75	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	N/A	N/A		100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	N/A	N/A		85	86	N/A	N/A	N/A	85	86	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A

3	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	N/A	-	91.67	80	N/A	N/A	N/A	91.67	80	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
	Persentase Desa Tertib Administrasi	N/A	N/A		91.67	80	N/A	N/A	N/A	91.67	80	N/A	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	N/A
2021																			
1	Nilai IKM Kecamatan	N/A	N/A	-	N/A	N/A	83.12	N/A	N/A	N/A	N/A	83.12	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00	N/A	N/A
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A		N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	90	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	87.5	N/A	N/A	N/A	N/A	87.5	N/A	N/A
	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A

2	rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A	83.33	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	83	N/A	N/A	N/A	N/A	83	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	83	N/A	N/A	N/A	N/A	83	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	N/A
2021 - 2023																			
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	91.33	93.33	N/A	N/A	N/A	87.3	30	N/A	N/A	N/A	96	32
	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100.00	N/A	N/A	N/A	100	30	N/A	N/A	N/A	100	30
	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	91.56	N/A	N/A	N/A	87.5	25	N/A	N/A	N/A	87.5	27

	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100.00	N/A	N/A	N/A	100	40	N/A	N/A	N/A	100	40
2	rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	88.33	94.44	N/A	N/A	N/A	88.33	0.83	N/A	N/A	N/A	100	0.88
	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	83	83.00	N/A	N/A	N/A	83	0.83	N/A	N/A	N/A	100	1.00
	Persentase Desa yang menetapkan APBdes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	100	100.00	N/A	N/A	N/A	100	0.83	N/A	N/A	N/A	100	0.83
	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	83	83.00	N/A	N/A	N/A	83	0.83	N/A	N/A	N/A	100	1.00

Tabel 2.3.2 T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padang
 Kabupaten Lumajang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	319,813,500	291,810,875	-	-	-	315,875,037	288,515,183	-	-	-	98.77	98.87	-	-	-	-	8.8%	-8.7%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	405,219,000	138,100,000	-	-	-	401,550,400	136,260,300	-	-	-	99.09	98.67	-	-	-	-	65.9%	-66.1%
Program peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	11,862,500	2,255,000	-	-	-	11,690,940	2,255,000	-	-	-	98.55	-	-	-	-	-	3.7%	-3.0%

n Kinerja																	
Progra m Penyel enggar aan Pemer intahan Kecam atan	517,390,0 00	331,295,0 00	-	-	-	517,229,2 00	331,035,0 00	-	-	-	99.97	99.9 22	-	-	-	0.0%	-0.05%
Progra m Penunj ang Urusa n Pemer intahan Daerah Kabup aten / Kota	-	-	1,675,884, 810	1,717,216, 600	1,784,130,91 3	-	-	1,667,220, 379	1,677,622, 693	354,612,8 21	-	-	99.4 8	97.6 9	-	-	-
Progra m Penyel enggar aan pemer intahan dan Pelaya nan Publik	-	-	-	-	5,915,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Progra m Pembe rdayaa n Masyar akat Masyar akat Desa dan Kelura han	-	-	18,620,00 0	13,500,00 0	132,475,000	-	-	18,620,00 0	13,500,00 0	8,975,000	-	-	100	100	-	0.0%	0.0%

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	15,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	1,200,000	2,400,000	4,200,000	-	-	1,200,000	2,400,000	-	-	-	100	100	-	0.0%	0.0%
Program Pembiayaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	232,270,000	216,000,000	222,300,000	-	-	232,270,000	216,000,000	54,000,000	-	-	100.00	100	-	0.0%	0.0%
Jumlah	1,254,285,000	763,460,875	1,927,974,810	1,949,116,600	2,164,315,913	1,246,345,577	758,065,483	1,919,310,379	1,909,522,693	417,587,821							

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Kecamatan Padang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab untuk Unsur Kewilayahan. Adapun Kelompok Sasaran Layanan dari Kecamatan Padang antara lain :

1. Aparatur Kecamatan Padang
2. Desa Se Kecamatan Padang
3. Forkompimca Padang
4. Warga Masyarakat di Kecamatan Padang
5. Kelompok Masyarakat Kecamatan Padang
6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
7. Instansi di Kecamatan Padang
8. Linmas Se Kecamatan Padang

2.5. MITRA PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, mitra Kecamatan Padang adalah :

1. Polsek Padang
2. Koramil
3. Desa se Kecamatan Padang
4. Dinas Instansi Se Kecamatan Padang

2.6. DUKUNGAN BUMD DALAM PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Belum ada dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Kecamatan Padang. Hal ini dikarenakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Padang tidak ada yang melibatkan BUMD.

2.7. KERJASAMA PERANGKAT DAERAH

Kerjasama Perangkat Daerah diimplementasikan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan dari Desa yang tertuang dalam DURKP dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang dengan penentuan skala prioritas hasil Musyawarah. Selanjutnya hasil dari Musrenbang tersebut akan dilimpahkan kepada masing – masing PD yang bertanggung jawab atas program sesuai usulan dari Desa. Forum PD sebagai wadah dalam penentuan apakah usulan dari Desa di wilayah Kecamatan dapat dilaksanakan atau tidak, disesuaikan dengan kemampuan anggaran PD dan skala prioritas dari Kabupaten Lumajang.

Kerjasama Perangkat Daerah juga diimplentasikan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa maupun kontruksi melalui Pihak Ketiga CV/PT, yang menggunakan Surat Perjanjian Kontrak kerja sesuai dengan Time Schedule perencanaan yang dibuat Perangkat Daerah.

Tabel 2.7.1

KERJASAMA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG TAHUN 2023

NO.	No. SPK	Nama Pekerjaan	Nama Pihak Ketiga	Keterangan
1.	01/SPK/427.93/2023	Pengadaan Alat Tulis Kantor	CV. CITRA ABADI	
2.	02/SPK/427.93/2023	Pengadaan Logistik	CV. JAYA ABADI	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Masalah Pokok yang dialami Perangkat Daerah Kecamatan Padang yaitu Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari Masalah pokok ini, selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

Faktor Masalah :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

Akar Masalah :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

Tabel 3.1 T-B 35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN PADANG - KABUPATEN LUMAJANG

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan 2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai 3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa 4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

3.2 ISU STRATEGIS

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi Kependudukan di wilayah kecamatan Padang dipengaruhi beberapa faktor antara lain :
 - a. Kondisi Geografis di wilayah Padang pegunungan dan bukit menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus administrasi kependudukan
 - b. Masih minimnya Sumber Daya Masyarakat Perdesaan.
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai antara lain :
 - a. Terbatasnya sarana komunikasi di Masyarakat
 - b. Masih Minimnya Jangkauan Sarana dan Prasarana Jaringan Tehnologi Informasi.
 - c. Kondisi Sarana Prasarana pelayanan yang belum memadai
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa antara lain :
 - a. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Kurangnya kerjasama antar lembaga di pemerintahan desa
4. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa antara lain :
 - a. Kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap tugas pokok dan fungsi
 - b. Masih banyak jabatan di beberapa desa yang belum terisi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran sendiri biasanya direpresentasikan melalui penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan diformulasikan tujuan strategik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Padang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Padang mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah ***Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi***. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan adalah ***Indeks Pelayanan Publik***.

Adapun Pencapaian indikator Nilai Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan setiap Tri Bulan.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah adalah :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)

2. Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah (jumlah desa yang menyusun RKPDesa Tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) dibagi jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang

dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

Tabel 4.1 T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN

JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Target		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	52.50 (C)	53.30 (C)	55.60 (C)
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	78.95	84.21	87.93
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	(jumlah desa yang menyusun RKPDesa Tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) dibagi jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%	100	100	100

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi		Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah hasil Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persen	
<i>Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran , dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	Persen	<i>Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</i>

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
<i>Terpenuhinya fasilitas Administrasi keuangan Perangkat daerah</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitas administrasi keuangan Perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dibutuhkan dikali 100</i>
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN/ Bulan
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
<i>Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah</i>	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</i>
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah ...	Laporan	Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah
<i>Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</i>
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
<i>Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100</i>
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Material
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Alat Besar	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Alat Besar
Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
Terpenuhinya fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
<i>Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100</i>
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan perizinannya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100
Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dibanding Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2
<i>Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</i>	<i>Persen</i>	<i>jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100</i>
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	Jumlah Keluarga Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100
<i>Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum</i>	<i>Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum</i>	<i>Fasilitasi</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</i>
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100
<i>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	<i>Fasilitasi</i>	<i>Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan</i>
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa		Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	(jumlah desa yang menyusun RKPDesa Tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) dibagi jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100
<i>Meningkatnya kualitas Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persen</i>	<i>Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100</i>
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Tujuan/ Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4	5
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD Kecamatan Padang adalah strategi dan kebijakan PD Kecamatan Padang untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Padang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Padang menunjukkan bagaimana cara PD Kecamatan Padang mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Padang serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi PD Kecamatan Padang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD Kecamatan Padang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD Kecamatan Padang bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi PD Kecamatan Padang. Strategi dan kebijakan PD Kecamatan Padang Tahun 2024-2026 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD Kecamatan Padang mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

5.1. Strategi

- a. Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima
- b. Meningkatkan pelayanan publik sektoral yang berfokus pada kegiatan perekonomian dan pembangunan, kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, administrasi kependudukan serta kegiatan DPRD
- c. Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa dengan cara peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kemitraan desa dengan stakeholder terkait

5.2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Padang. Arah Kebijakan PD Kecamatan Padang antara lain :

- a. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
- b. Meningkatkan Sosialisasi Adminduk pada Masyarakat
- c. Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
- d. Meningkatkan transparansi pemerintahan
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
- g. Revitalisasi lembaga kemasyarakatan desa
- h. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- i. Meningkatkan kerja sama desa

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pebangunan dengan memperhatikan konsistensi penjabaran program dan kegiatan serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
			Mengoptimalkan Proses Perencanaan pembangunan Desa
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dengan cara meningkatkan kualitas penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan perangkat daerah, pengelolaan barang milik perangkat daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan
			Mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
		Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional perkantoran pemerintah, pelayanan administrasi yang sesuai SOP, dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
			Mengoptimalkan pelayanan kedinasan
	Meningkatkan kondusifitas daerah melalui peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, peningkatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	
	Meningkatkan pengarusutamaan gender dengan cara meningkatkan pemberdayaan perempuan.	Meningkatkan upaya penanganan konflik sosial	
		Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	
		Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan	
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan cara peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kemitraan desa dengan stakeholder terkait	Revitalisasi lembaga kemasyarakatan desa
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Padang selama 3 tahun ke depan (2024 - 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Padang adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota
 - I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - g. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - j. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- III. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- i. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang bMilik Daerah SKPD
 - ii. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - j. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- IV. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- k. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

- V. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - k. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - l. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - m. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - n. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
 - o. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - p. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - q. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar
 - r. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - s. Sub Gedung Pengadaan Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
- VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - t. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - u. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - v. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VIII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - w. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - x. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan

Perizinan Alat Besar

y. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

z. Sub Kegiatan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya

aa.Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

IX. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

bb.Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

X. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

cc. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

XI. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

dd. Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Desa

ee. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan

ff. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan

XII. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan

gg. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

hh. Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan an Keterampilan untuk

mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

- ii. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- jj. Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- kk. Sub kegiatan Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- ll. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap bencana Rumah Tangga
- mm. Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

XIII. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- nn. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tenatara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- oo. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

XIV. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- pp. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

XV. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan

dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- qq. Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- rr. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- ss. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- tt. Sub Kegiatan Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan
- uu. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- vv. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- ww. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- xx. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- yy. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

6.2. PENDANAAN

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Padang bersumber pada Dana Alokasi Umum – Dana Transfer Umum APBD Kabupaten Lumajang.

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.01	Meningkatnya kualitas fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100%	100%	1,697,536,000	100%	1,845,270,000	100%	2,022,270,000	100%	5,565,076,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.01.01.2	Meningkatnya kualitas fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	24,500,000	100%	30,500,000	100%	41,000,000	100%	96,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	3 Dokumen	6,000,000	2 Dokumen	8,000,000	7 Dokumen	18,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.01.2.01.02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	8,000,000	3 Dokumen	17,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 1.2.01. 03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	4,000,000	2 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	8,000,000	6 Dokumen	17,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 1.2.01. 06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	4,500,000	5 Laporan	6,000,000	5 Laporan	8,000,000	15 Laporan	18,500,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 1.2.01. 07	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	8,000,000	8 Laporan	8,500,000	8 Laporan	9,000,000	24 Laporan	25,500,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 1.2.02	Meningkatnya kualitas fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan 100	100%	100%	1,243,016,000	100%	1,347,000,000	100%	1,379,000,000	100%	3,969,016,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 1.2.02. 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Jumlah ASN/ Bulan	13 Orang/12 Bulan	13 Orang/12 Bulan	1,200,000,000	13 Orang/12 Bulan	1,300,000,000	13 Orang/12 Bulan	1,310,000,000	13 Orang/36 Bulan	3,810,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 1.2.02. 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	31,016,000	12 Dokumen	33,000,000	12 Dokumen	50,000,000	36 Dokumen	114,016,000	Kec Padan g	Kec Padan g

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 1.2.02. 04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	6,000,000	12 Dokumen	9,000,000	36 Dokumen	20,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.02. 05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	6,000,000	1 Laporan	8,000,000	3 Laporan	19,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.01. 06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Laporan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	2 Dokumen	2,000,000	6 Dokumen	6,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.03	Meningkatnya kualitas fasilitasi pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	10,000,000	100%	13,000,000	100%	18,000,000	100%	41,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.03. 05	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	2 Laporan	6,000,000	2 Laporan	9,000,000	6 Laporan	20,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.03. 06	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	Jumlah Laporan fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	7,000,000	12 Laporan	9,000,000	36 Laporan	21,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 1.2.05	Meningkatnya kualitas fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	-	100%	5,400,000	-	9,000,000	100%	14,400,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.05. 02	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	N/A	-	-	1 Paket	5,400,000	1 Paket	9,000,000	2 Paket	14,400,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06	Meningkatnya kualitas fasilitasi pemenuhan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	102,500,000	100%	127,350,000	100%	157,000,000	100%	386,850,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06. 01	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	15,000,000	3 Paket	30,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06. 04	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	40,000,000	3 Paket	44,000,000	3 Paket	50,000,000	9 Paket	134,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06. 05	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	4 Paket	9,000,000	4 Paket	13,000,000	4 Paket	15,000,000	12 Paket	37,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 1.2.06. 07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	2 Paket	2 Paket	5,000,000	2 Paket	9,350,000	2 Paket	10,000,000	6 Paket	24,350,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06. 08	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	8,500,000	12 Laporan	11,000,000	12 Laporan	12,000,000	36 Laporan	31,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.06. 09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35,000,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	55,000,000	36 Laporan	130,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.07	Meningkatnya kualitas fasilitas pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah dipenuhi dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	101,500,000	-	-	-	-	100%	101,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.07. 06	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	N/A	110 Unit	101,500,000	-	-	-	-	8 Unit	101,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.08	Meningkatnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dipenuhi dibagi Jumlah fasilitas jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100%	100%	168,270,000	100%	174,270,000	100%	188,270,000	100%	530,810,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 1.2.08. 01.	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	4,000,000	12 Laporan	8,000,000	36 Laporan	15,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.08. 02.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	45,000,000	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	60,000,000	36 Laporan	155,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.08. 04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120,270,000	12 Laporan	120,270,000	12 Laporan	120,270,000	36 Laporan	360,810,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.09	Meningkatnya fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah barang milik daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100%	100%	47,750,000	100%	147,750,000	100%	230,000,000	100%	425,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.09. 02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	35,400,000	7 Unit	35,400,000	7 Unit	45,000,000	21 Unit	115,800,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.09. 06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	19 Unit	12,350,000	19 Unit	12,350,000	19 Unit	35,000,000	57 Unit	59,700,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 1.2.09. 9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	N/A	1 unit	-	2 Unit	100,000,000	1 Unit	150,000,000	2 Unit	250,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07.01.02	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah Pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi jumlah Pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	100%	100%	44,640,000	100%	46,000,000	100%	48,500,000	100%	139,140,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.02.2.01	Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan dikali 100	100%	100%	4,860,000	100%	5,000,000	100%	7,000,000	100%	16,860,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.02.2.01.02	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4,860,000	4 Dokumen	5,000,000	4 Dokumen	7,000,000	12 Dokumen	16,860,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.02.2.04	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang direncanakan dikali 100	100%	100%	39,780,000	100%	41,000,000	100%	41,500,000	100%	122,280,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 2.2.04. 03	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	39,780,000	12 Laporan	41,000,000	12 Laporan	41,500,000	36 Dokumen	122,280,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2	100%	100%	281,500,000	100%	298,000,000	100%	349,000,000	100%	883,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3.2.01	Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	100%	100%	206,500,000	100%	218,000,000	100%	269,000,000	100%	693,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3.2.01. 01	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7,500,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	9,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	10,000,000	8 Lembaga Kemasyarakatan	26,500,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 3.2.01. 02	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	1 Dokumen	9,000,000	1 Dokumen	9,000,000	3 Dokumen	27,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3.2.01. 03	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan	190,000,000	9 Laporan	200,000,000	9 Laporan	250,000,000	27 Laporan	640,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3.2.06	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan dikali 100	100%	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	190,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 3.2.06. 04	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah Keluarga Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	45 Keluarga	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	20,000,000	90 Keluarga	20,000,000	270 Keluarga	55,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 3.2.06. 06	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	45 Keluarga	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	270 Keluarga	45,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 3.2.06. 07	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	45 Keluarga	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	270 Keluarga	45,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 3.2.06. 08	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi lainnya	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi	45 Keluarga	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	270 Keluarga	45,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 3.2.06. 11	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	45 Keluarga	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	90 Keluarga	15,000,000	270 Keluarga	45,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi dibagi Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan dikali 100	100%	100%	23,400,000	100%	33,000,000	100%	36,550,000	100%	92,950,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.04.2.01	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	23,400,000	2 Fasilitasi	33,000,000	2 Fasilitasi	36,550,000	6 Fasilitasi	92,950,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.04.2.01.01	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	28,000,000	3 Laporan	68,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.04.2.01.02	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	8,400,000	4 Laporan	8,000,000	4 Laporan	8,550,000	12 Laporan	24,950,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05	Meningkatnya kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan dikali 100	100%	100%	7,200,000	100%	7,920,000	100%	8,712,000	100%	23,832,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.05.2.01	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitas	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1 Fasilitas	1 Fasilitas	7,200,000	1 Fasilitas	7,920,000	1 Fasilitas	8,712,000	3 Fasilitas	23,832,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.05.2.01.08	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,200,000	12 Dokumen	7,920,000	12 Dokumen	8,712,000	36 Dokumen	23,832,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.06	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPdes tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100	100%	100%	35,000,000	100%	68,000,000	100%	63,000,000	100%	166,000,000	Kec Padang	Kec Padang
			Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBdes tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100											
			Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu dibagi Jumlah desa dikali 100											

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 6.2.01	Meningkatnya kualitas Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persen	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100	9 Desa	9 Desa	35,000,000	9 Desa	68,000,000	9 Desa	63,000,000	9 Desa	166,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01.01	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen	18 Dokumen	5,000,000	18 Dokumen	5,000,000	18 Dokumen	5,000,000	54 Dokumen	15,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01.02	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	15,000,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	13,000,000	27 Dokumen	48,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01.03	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	5,000,000	9 Dokumen	20,000,000	9 Dokumen	20,000,000	27 Dokumen	45,000,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 6.2.01. 05	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	5,000,000	9 Dokumen	5,000,000	9 Dokumen	20,000,000	27 Dokumen	30,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01. 06	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A	-	-	6 Dokumen	13,000,000	-	-	6 Dokumen	13,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01. 08	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	N/A	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	3 Dokumen	15,000,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01. .07	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	N/A	6 Dokumen	10,500,000	6 Dokumen	5,500,000	6 Dokumen	13,500,000	18 Dokumen	29,500,000	Kec Padang	Kec Padang
7.01.0 6.2.01. .08	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	N/A	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	13,500,000	3 Dokumen	28,500,000	Kec Padang	Kec Padang

Kode	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi Penghitungan	Capaian awal tahun perencanaan (Tahun 2022)	2024		2025		2026		Akhir Periode		Unit Kerja	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.0 6.2.01 .12	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	N/A	6 Dokumen	11,000,000	6 Dokumen	7,500,000	6 Dokumen	13,500,000	18 Dokumen	32,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g
7.01.0 6.2.01 .18	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	N/A	6 Laporan	35,000,000	6 Laporan	21,000,000	6 Laporan	35,000,000	18 Laporan	91,000,000	Kec Padan g	Kec Padan g

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama tiga tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Kecamatan Padang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis PD Kecamatan Padang Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang undangan.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam

rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Adapun dari tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan Indikator Tujuan/ Sasaran yang terdiri dari :

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Padang

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 3 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2024 tercapai 78.95 %
- b. Pada tahun 2025 tercapai 84.21 %
- c. Pada tahun 2026 tercapai 87.93 %

2. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 3 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2024 tercapai 100 %
- b. Pada tahun 2025 tercapai 100 %
- c. Pada tahun 2026 tercapai 100 %

3. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Target Kinerja Tujuan / Sasaran selama 3 Tahun yaitu :

- a. Pada tahun 2024 tercapai 96.30 %
- b. Pada tahun 2025 tercapai 96.30 %
- c. Pada tahun 2026 tercapai 100.00 %

7.2. PENENTUAN TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi Kecamatan serta meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Padang disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel T-C.28.

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPD**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil Penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten	N/A	52.5 (C)	53.3 (C)	55.6 (C)	82 (B)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan) Dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi (Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan)	87.30 %	78.95 %	84.21 %	87.93 %	96.05 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dibutuhkan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Persen	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas fasilitasi Pemenuhan pelaporan administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah yang direncanakan dikali 100					
	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi keuangan Perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangn dibutuhkan dikali 100					
	Terpenuhinya fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Terpenuhinya fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	Jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan dibagi Jumlah Barang Milik Daerah yang direncanakan pemeliharaan dikali 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Persen	Jumlah pelayanan PATEN yang dilaksanakan sesuai SP dan SOP dibagi Jumlah pelayanan yang diajukan oleh masyarakat dikali 100	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persen	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan dibagi Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang direncanakan x 100	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persen	Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dibanding Jumlah fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dikali 100	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Persen	Jumlah (persentase) fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan	87.50 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2					
	Meningkatnya kualitas koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Persen	jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100	0.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persen	Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100	0.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100	0.00 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	Falilitasi	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	0 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi	2 fasilitasi
	Meningkatnya kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi	1 fasilitasi
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Persen	(jumlah desa yang menyusun RKPDesa Tepat Waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu) dibagi jumlah seluruh desa diwilayah kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%	88.33 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	96.67 %
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi	100 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
						2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah desa x 100 %					
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	Persen	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	66.67 %	66.67 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
	Meningkatnya kualitas Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan dikali 100	89 %	94 %	94 %	94 %	94 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Padang Tahun 2024–2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026.

Renstra didasari adanya perubahan klasifikasi, kodesifikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organisasi dan akun yang digunakan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu PD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Padang. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Padang.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Padang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Padang ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Padang yang merupakan break down dari RPD Kabupaten Lumajang.

Padang, Mei 2023


CAMAT PADANG
Drs. JAMAK NURWANTO
NIP. 19690606 199803 1 006